



Dr. Eko Harry Susanto



KOMUNIKASI MANUSIA

ESENSI DAN APLIKASI
DALAM DINAMIKA
SOSIAL EKONOMI POLITIK



**Mitra
Wacana
Media**
Penerbit

Komunikasi Manusia

Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik

Dr. Eko Harry Susanto

Editor : 1. Drs. Widayatmoko, MM.

2. Dra. Riris Loisa, M.Si.



Edisi Asli

Hak Cipta ©2010, Penerbit Mitra Wacana Media

Telp. : (021) 824-31931

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>

E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Eko Harry Susanto

Komunikasi Manusia

Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik

Edisi Pertama

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010

1 jil., 17 x 24 cm, hal. 200

ISBN: 978-602-8495-53-0

1. Politik 2. Judul

Kata Pengantar

Buku berjudul Komunikasi Manusia : Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, berupaya untuk melihat komunikasi dalam perspektif teoritis dan penerapannya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Tulisan yang terdapat dalam buku ini, terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada Bab I sampai Bab IV mengemukakan aspek yang substansial dalam komunikasi manusia, dan Bab V sampai Bab VI merupakan, artikel yang ditulis pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, yang berkaitan dengan demokrasi, keterbukaan informasi dan pemahaman terhadap keanekaragaman masyarakat dilihat dari sudut pandang ilmu komunikasi.

Kumpulan artikel sebagai bentuk penerapan komunikasi manusia yang ada dalam buku ini, sebelumnya sudah dimuat di Harian Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Seputar Indonesia, Jurnal Nasional, Suara Karya dan Pikiran Rakyat Bandung. Tentu saja sejak tahun 2004 terjadi perubahan, sehingga artikel yang ada di buku ini, mungkin tidak sesuai dengan kondisi sekarang, atau justru menjawab keadaan sekarang yang sebelumnya sudah diprediksikan.

Khusus tulisan – tulisan tentang transparansi informasi yang beruntun, sesungguhnya tidak terlepas dari pengalaman keikutsertaan penulis dalam berbagai diskusi yang membahas kompleksitas transparansi informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga yang memiliki kepedulian untuk memperjuangkan kebebasan informasi. Secara kontekstual, tulisan didalamnya, disamping berisi analisis, penelaahan, kritik maupun saran dalam upaya menciptakan transparansi informasi, juga mengandung dorongan agar institusi publik yang memiliki otoritas dalam pengelolaan informasi, mau menerima prinsip keterbukaan informasi, demi untuk mencapai masyarakat informasi yang demokratis.

Pada hakikatnya, aplikasi komunikasi manusia yang dituangkan pada tulisan ini, merupakan gambaran faktual situasi yang berlangsung pada saat

itu, yang ditelaah dari sudut perspektif ilmu komunikasi sebagai bidang ilmu yang multidisipliner.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Ir. Alphonsus Priyo Hutomo, S.Si., M.Si, Drs. Widayatmoko, MM., Dr. Andy Corry W., Dra. Riris Loisa, M.Si., Drs. Atang Sugiyono, M.Si., dan Dr. Chairy Saidjan sebagai teman diskusi penulisan buku. Terimakasih kepada semua pihak di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta, perguruan tinggi lainnya tempat penulis mengajar yang memberikan dukungan, kritik ataupun saran pada setiap tulisan saya yang dimuat di surat kabar, dan Yayasan Supriyatna yang mengumpulkan artikel saya di surat kabar.

Kepada Maya, Dekky, Dennis dan Deffri, yang selalu memberikan komentar pendek terhadap tulisan saya di surat kabar, saya mengucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua.

Jakarta, September 2009

Penulis.

Daf

**Kata
Dafta**

Bab

Bab

g ilmu

onsus
ry W.,
aidjan
hak di
urusan
kritik
Yayat

mentar
kasih.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Komunikasi Manusia	1
A. Esensi Komunikasi	1
1. Menggambarkan Realitas	1
2. Menjelaskan Realitas	3
3. Prediksi, Kontrol dan Pemahaman	3
4. Reformasi	3
B. Konteks Komunikasi	6
1. Komunikasi Intrapersonal	7
2. Komunikasi Interpersonal	7
3. Komunikasi Kelompok	7
4. Komunikasi Organisasi	8
5. Komunikasi Massa	9
C. Teknologi Komunikasi	12
D. Komunikasi Efektif	13
E. Penelitian Dalam Komunikasi	14
Bab 2 Komunikasi Politik	17
A. Batasan Komunikasi Politik	17
1. Komunikator Politik	20
2. Pesan Politik : Pembicaraan Politik dan Persuasi Politik	20
a. Pembicaraan Politik	20
b. Persuasi Politik	22
3. Media Komunikasi Politik	22
4. Khalayak Komunikasi Politik	22
5. Dampak Komunikasi Politik	23

	B. Komunikasi Politik dan Pembangunan	23
	C. Media Massa dan Kekuasaan Politik	29
Bab	3 Komunikasi Politik dan Globalisasi	35
	A. Konflik Antar Kelompok dan Opini Global	37
	B. Ketergantungan Informasi	41
	C. Marginalisasi Negara Pinggiran Dalam Opini Internasional	44
Bab	4 Teknologi Komunikasi dan Perubahan Sosial	51
	A. Dampak Teknologi Komunikasi	52
	B. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Teknologi Komunikasi	54
	C. Teknologi Komunikasi : Sarana Menuju Globalisasi	56
Bab	5 Dinamika Partai Politik	59
	1. Kredibilitas Politik PDIP	59
	2. Mempersiapkan Partai Lokal	62
	3. Target PAN Tahun 2009	64
	4. Marissa dan PDIP 2009	66
	5. Peran Oposisi Partai Moncong Putih	68
	6. Menduga Pemenang Pilkada Jakarta	70
	7. Menakar Megawati Pada 2009	73
	8. Tokoh Muda, Pemilih Muda dan Megawati	75
	9. Kabinet Bayangan Calon Presiden	78
	10. Menimbang Pasangan Mega - Sultan	80
	11. Duet Megawati - Jusuf Kalla	82
	12. Menduga Pasangan Presiden 2009	85
	13. Koalisi Pasca Kemenangan Demokrat	87
	14. Menduga Arah Partai Golkar	91
Bab	6 Komunikasi Politik dan Kekuasaan	95
	1. Deputi Khusus Pancasila Lemhannas	95
	2. Standar Informasi Gempa	97
	3. Kemandirian Penasehat Presiden	99
	4. Komunikasi di Wilayah Politik	102

Bab

Bab

23		5. Lee Kuan Yew dan Demokrasi	104
29		6. Program Instan Kompor Gas	107
35	Bab 7	Transparansi Informasi dan Korupsi	111
37		1. RUU Informasi dan Pemberantasan Korupsi	111
41		2. RUU Rahasia Negara dan Pelembagaan Anti Kritik	113
44		3. Meneropong Korupsi di Legislatif	115
		4. Melahirkan Bibit Pemberantasan Korupsi	118
		5. RUU KMIP dan Kultur Keterbukaan	120
51		6. Keterbukaan Informasi BUMN	122
52		7. Keterbukaan Informasi dan FOIA	125
		Freedom of Information Act (FOIA)	126
54		Menumbuhkan Kultur Demokrasi	127
56		8. Keterbukaan Informasi	
		dan Pemberantasan Korupsi	127
		9. Birokrasi Informasi dan Korupsi	130
59		10. Perkecualian Informasi RUU KIP	
59		dan Potensi Alam	132
62		11. Rahasia Negara, Korupsi dan Komisi Informasi	135
64		12. Rahasia Negara, KPK dan Komisi Informasi	138
66		13. Rahasia Negara dan Keterbukaan Informasi	140
68		14. Demokratisasi Informasi dan Transaksi Elektronik	142
70			
73	Bab 8	Iklan Politik dan Pencitraan	145
75		1. Membaca Hasil Jajak Pendapat	145
78		2. Iklan Puas Diri Mendagri	148
80		3. Sentimen Anti Amerika	150
82		Pendahuluan	150
85		Hasil Survei Sentimen Anti Amerika	151
87		Asumsi Kendala Penelitian	153
91		Dalam Kutub Pendapat Mayoritas	155
		Penutup	156
95		4. "Polling" Pilkada Dalam RUU Pemilu	156
95		5. Iklan Politik	159
97		6. Pluralisme dan Retorika Politik	161
99		7. Jajak Pendapat dan Kampanye Terselubung	163
02			

Bab 9	Kebebasan Informasi dan Politik Lokal	167
	1. Marginalisasi Politik Pedesaan	167
	2. Transparansi Politik Kepala Desa	170
	3. ExxonMobil : Harapan Masyarakat Desa	172
	4. Bunuh Diri Korban Gempa	174
	5. Revitalisasi (Politik) Pertanian	176
	6. Plus Minus Calon Independen	178
	7. Rating dan Integrasi Nasional	181
Daftar Pustaka		185
Biodata Penulis		191

67
67
70
72
74
76
78
81
85
91

Bab 1

KOMUNIKASI MANUSIA

A. Esensi Komunikasi

Dalam pembahasan tentang komunikasi manusia, Ruben (1992:41) menyatakan, "komunikasi merupakan studi interdisipliner, berbagai ilmu pengetahuan memberikan corak perkembangan terhadap ilmu komunikasi itu sendiri". Sejalan dengan pernyataan tersebut adalah pendapat Littlejohn (1992 : 11), komunikasi manusia merupakan studi interdisipliner yang menyelidiki proses komunikasi, dengan menggunakan pandangan dari berbagai disiplin tradisional ilmu pengetahuan.

Karena itu, sesuatu yang wajar jika pengertian komunikasi sangat beragam, tergantung dari pendekatan yang digunakan dalam menelaah eksistensi maupun kompleksitas komunikasi. Keberagaman tentang batasan komunikasi tersebut, merupakan implikasi terbentuknya teori, yang memiliki tujuan tertentu, sehingga satu sama lain mempunyai perbedaan pendekatan yang spesifik.

Menurut Julia T. Wood (2006 : 31), "teori di formulasikan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu, yang menggambarkan realitas (deskripsi), menjelaskan realitas (eksplanasi), dan melakukan prediksi, kontrol, dan pemahaman, dan reformasi". Faktor – faktor tersebut memiliki karakteristik tertentu dalam menggambarkan atau membentuk suatu fenomena dalam teori komunikasi.

1. Menggambarkan Realitas

Teori menggambarkan realitas atau suatu fenomena, yang dimulai dengan merinci karakteristik dan komponen utama dari suatu fenomena. Didalam menggambarkan suatu fenomena tersebut, ilmuwan cenderung subyektif, karena apa yang ditangkap dalam pemahaman seorang ilmuwan dipengaruhi

yumpulan
a sangat
nun tidak
nampuan
memadai

Bab 2

KOMUNIKASI POLITIK

Secara substansial, komunikasi politik biasa dihubungkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal, yang dapat mempengaruhi rakyat ataupun pemegang kekuasaan dalam suatu sistem politik. Dapat juga dikatakan, komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama.

Keterkaitan erat komunikasi dan politik, khususnya dalam penelaahan terhadap peran negara, ditegaskan oleh MacBride (1983:85), bahwa komunikasi secara keseluruhan tidak dapat dimengerti apabila tidak dihubungkan dengan dimensi politik, masalah-masalahnya tidak dapat disesuaikan apabila tidak diperhatikan hubungan politik-politiknya. Secara umum, komunikasi politik digunakan dalam konteks penelaahan pesan-pesan yang di organisasikan dan disebarakan kepada rakyat oleh organ-organ kekuasaan negara maupun institusi pemerintah.

A. Batasan Komunikasi Politik

Untuk memahami komunikasi politik, ada baiknya diketahui lebih dahulu pernyataan mendasar dari Watzlawick (dalam Bower dan Bradac, 1982 : 3), "manusia adalah makhluk yang tidak bisa tidak berkomunikasi". Dengan kata lain, semua tingkah laku manusia, termasuk pada saat diam, tidak merespon pesan politik dari suatu sumber, tetap saja menimbulkan makna yang lekat dengan nuansa politik. Sedangkan Dan Nimmo (1993 : 167), menyatakan bahwa, saluran komunikasi bukan sekadar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauhmana dapat dipercaya.

Bab 3

KOMUNIKASI POLITIK dan GLOBALISASI

Negara kawasan selatan mempunyai persoalan yang pelik dalam urusan domestik maupun urusan internasional. Problem yang muncul merupakan gambaran kronik keadaan negara yang belum mapan secara sosial, ekonomi dan politik. Ketidakstabilan tersebut tampak dari timbulnya gejolak, konflik bahkan huru-hara yang terjadi di dalam negeri maupun dalam hubungan bilateral dengan negara lain. Ketika negara-negara sedang berkembang masih dikuasai oleh rezim-rezim represif, dan penyebaran teknologi komunikasi masih menjadi problem potensial bagi negara pinggiran, maka gaung ketidakdemokratisanpun hanya bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang memiliki akses khusus dengan media alternatif, di luar kendali manajemen komunikasi para penguasa.

Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dalam penyebaran informasi, maka persoalan dalam negeri suatu negara berkembang selalu menimbulkan penilaian atau opini masyarakat internasional yang mempunyai kepedulian terhadap perdamaian dunia, atau mereka yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, kejadian di suatu negara dan tingkah laku politik rezim yang berkuasa dimanapun, di belahan dunia, akan terdeteksi dengan mudah oleh masyarakat internasional.

Penyebaran pesan yang sangat cepat tidak terlepas dari kekuatan komunikasi global yang didukung oleh teknologi komunikasi. Menurut Baylist dan Smith (2005 : 8), globalisasi berkembang dengan cepat dan menciptakan dampak ke seluruh dunia. Globalisasi merupakan ruang bersama yang menghilangkan batas sosial, ekonomi, politik dan batas relatif terhadap nasionalisme.

Celakanya, dalam koridor globalisasi, kedudukan negara sedang berkembang justru mempunyai ketergantungan dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik terhadap negara maju. Oleh sebab itu sulit untuk menghindar

Bab 4

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial merupakan gejala yang wajar di dalam masyarakat, tetapi alasan terjadinya perubahan, adalah permasalahan yang perlu ditelaah dan dimulailah. Hoogvelt (1976 : 9) menyatakan, "tidak ada masyarakat yang stagnan, oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang sosial secara cepat atau lambat". Hakekat perubahan sosial menurut Rogers dan Swearing (1969 : 8) adalah, "proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial". Sementara itu secara singkat arti perubahan sosial dikemukakan oleh Daniel Lerner (1983 : 29 - 31) yang pada intinya menyebutkan, "perubahan sosial adalah mengubah cara - cara di dalam mana suatu manusia hidup sehari - hari.

Faktor - faktor yang memicu terjadinya perubahan sosial dalam pandangan komunikasi dikemukakan oleh Rogers (1986 : 110), "teknologi komunikasi baru adalah salah satu dari sebab - sebab yang penting dari perubahan - perubahan sosial di masyarakat". Teknologi komunikasi lebih banyak berpengaruh terhadap anak - anak muda dibandingkan kepada anak - anak dan orang tua, misalnya efek dari televisi dan komputer yang banyak beredar di masyarakat. Namun dalam perkembangannya, televisi dan komputer juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap anak - anak maupun orang dewasa, karena mengandung pesan dan informasi yang dibutuhkan ataupun menarik bagi semua orang, tanpa tersegmentasi dalam usia.

Kekhawatiran terhadap teknologi komunikasi yang berdampak negatif, juga menjadi pembicaraan yang menarik ketika masyarakat menghubungkan dengan era kebebasan akses informasi. Dalam konteks itu, Tom Bottomore (1983 : 114) mengatakan, "sewaktu gelombang industrialisasi dan modernisasi bergerak ke luar, ia merusak unit - unit sosial dan politik sebelumnya yang secara umum sebelumnya dipercaya". Rusaknya tatanan dalam masyarakat

Bab 4

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial merupakan gejala yang wajar di dalam masyarakat, tetapi pemicu terjadinya perubahan, adalah permasalahan yang perlu ditelaah lebih mendalam. Hoogvelt (1976 : 9) menyatakan, "tidak ada masyarakat yang stagnan, oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara cepat atau lambat". Hakekat perubahan sosial menurut Rogers dan Svenning (1969 : 8) adalah, "proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial". Sementara itu secara singkat arti perubahan sosial dikemukakan oleh Daniel Lerner (1983 : 29 - 31) yang pada intinya menyebutkan, "perubahan sosial adalah mengubah cara - cara di dalam mana umat manusia hidup sehari - hari.

Faktor - faktor yang memicu terjadinya perubahan sosial dalam pandangan komunikasi dikemukakan oleh Rogers (1986 : 110), "teknologi komunikasi baru adalah salah satu dari sebab - sebab yang penting dari perubahan - perubahan sosial di masyarakat". Teknologi komunikasi lebih banyak berpengaruh terhadap anak - anak muda dibandingkan kepada anak - anak dan orang tua, misalnya efek dari televisi dan komputer yang banyak beredar di masyarakat. Namun dalam perkembangannya, televisi dan komputer juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap anak - anak maupun orang dewasa, karena mengandung pesan dan informasi yang dibutuhkan ataupun menarik bagi semua orang, tanpa tersegmentasi dalam usia.

Kekhawatiran terhadap teknologi komunikasi yang berdampak negatif, juga menjadi pembicaraan yang menarik ketika masyarakat menghubungkan dengan era kebebasan akses informasi. Dalam konteks itu, Tom Bottomore (1983 : 114) mengatakan, "sewaktu gelombang industrialisasi dan modernisasi bergerak ke luar, ia merusak unit - unit sosial dan politik sebelumnya yang secara umum sebelumnya dipercaya". Rusaknya tatanan dalam masyarakat

di (1995
n sempat
sehingga
ak cocok
hal yang
yang ada

munikasi
nunikasi.
prospek
i bahaya
dak bisa
a untuk
terdapat

lakukan
erupaya
eknologi
encakup
melalui

unikasi,
adalah
n mana
mampu
au yang
t sangat
syarakat
kuasaan

knologi
bungan
emakin

Bab 5

DINAMIKA PARTAI POLITIK

1. Kredibilitas Politik PDIP

(Kompas, 10 Mei 2006)

Kerusuhan dalam pilkada Tuban adalah ironi bagi PDI-P, yang sebelumnya mengklaim telah memenangi 50 persen pilkada yang diselenggarakan sejak bulan Juni 2005 sampai dengan Maret 2006.

Prestasi mencengangkan yang dikemukakan oleh Tjahjo Kumolo tersebut merupakan salah satu keberhasilan PDI-P dalam persaingan politik lokal setelah menetapkan diri sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Belum tuntas masalah Tuban, PDI-P dituding mencuri start kampanye Pemilu 2009, setelah partai berlambang banteng gemuk itu mengumpulkan para bupati, wali kota, dan gubernur, serta para ketua DPRD dari berbagai daerah dalam rakornas di Surabaya. Mereka berikrar setia terhadap delapan program partai yang disebut dengan Hasta Prasetya, sebuah program partai yang peduli terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dengan bingkai "ideologi" partai oposisi.

Sebenarnya orang tidak perlu terburu-buru menuduh "ikrar kesetiaan" sebagai tindakan mencuri start dan berpotensi menimbulkan ambivalensi loyalitas terhadap partai atau pemerintah. Sebab, jika kita kaji tanpa prejudice sebuah kekuatan partai oposisi, Hasta Prasetya PDI-P sama juga dengan program pemerintah. Kekhawatiran terhadap rakornas PDI-P dengan sejumlah prasangka politis adalah berlebihan.

Bab 6

KOMUNIKASI POLITIK DAN KEKUASAAN

1. Deputi Khusus Pancasila Lemhannas

(Kompas, 27 Juni 2006)

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi wacana yang ramai dibicarakan kembali di kalangan elite politik dan kalangan yang memiliki perhatian besar terhadap kelangsungan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam koridor reformasi politik, diskusi tentang Pancasila menjadi kian dinamis karena menghasilkan keberagaman pemikiran, dari yang menyuarakan Pancasila dalam analisis positivistik bersifat final yang lebih menekankan perluasan nilai sesuai perkembangan zaman, maupun pendapat lain yang bersifat subyektif berpijak pada penafsiran integralistik untuk kepentingan kelompoknya.

Namun, yang muncul dalam wacana publik tetap ada kesepakatan, Pancasila adalah payung ideologis kehidupan bernegara. Namun, jika masih muncul kekhawatiran atas menipisnya pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sikap wajar, mengingat pengabaian terhadap ideologi negara mendorong munculnya konflik kepentingan dalam masyarakat yang kian meningkat.

Pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila tampaknya tidak lagi bersifat matematis dengan butir-butir pengembangan dari tiap sila yang potensial dipakai sebagai alat penguasa mengesahkan kebijakannya.

Sejatinya nilai-nilai Pancasila yang hakiki adalah sumber kekuatan demokrasi dalam kehidupan bernegara, jika dijalankan dengan benar dan tidak terbatas retorika belaka.

Bab 7

TRANSPARANSI INFORMASI DAN KORUPSI

1. RUU Informasi dan Pemberantasan Korupsi

(Harian Seputar Indonesia, 21 Maret 2006)

Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) merupakan pekerjaan rumah Dewan Perwakilan Rakyat RI yang akan segera memasuki tahap pembahasan antara Komisi 1 DPR RI dan pihak pemerintah. Selanjutnya diharapkan RUU KMIP segera dipisahkan menjadi undang-undang sehingga upaya masyarakat dalam mencari, memilih, sumber, menyalurkan bahkan menolak secara tegas informasi dapat dijamin legalitasnya.

Batasan informasi dalam RUU KMIP sudah tertuang pada pasal demi pasal secara komprehensif. Namun sepertinya, penjelasan terhadap pasal-pasal di dalamnya belum mampu untuk menempatkan informasi sebagai alat efektif untuk mengawasi lalu lintas informasi dibelantara birokrasi badan publik di Indonesia. Sebab, yang tampak menonjol adalah justru upaya mengemas informasi sebagai komoditas yang direkayasa, di bumbui dan dibingkai manis sehingga tidak menampakkan lagi bentuk naturalnya sebagaimana yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat.

Dalam bentuk lain, informasi publik versi RUU KMIP berpeluang mengalir ke suatu arah tertentu dan dipakai secara kasar untuk merepresentasikan kekuatan negara yang alergi terhadap pluralisme informasi. Artinya : pesan pemerintah diposisikan sebagai informasi yang harus dipercaya kebenarannya tanpa memberikan peluang munculnya transaksi pesan secara seimbang di masyarakat. Ternyata, ideologi paranoid dalam bernegara yang menjunjung tinggi doktrin "pengendali informasi adalah negara beserta organ-organ kekuasaannya" masih terus menancapkan kukunya. Di pihak

Bab 8

IKLAN POLITIK DAN PENCITRAAN

1. Membaca Hasil Jajak Pendapat

(Kompas, 9 Agustus 2005)

Hasil jajak pendapat yang ditulis Kompas pada 25 Juli 2005 yang intinya bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat populer di mata rakyat, ditanggapi dengan sukacita oleh Andi Mallarangeng selaku Juru Bicara Presiden.

Membaca hasil jajak pendapat tidak sebatas melihat data kuantitatif yang dipaparkan secara sepenggal-sepenggal, tidak terintegrasi. Menelaah data primer memerlukan kejernihan pemikiran yang bebas nilai, dalam artian dalam benak kita tidak boleh ada persepsi terhadap persoalan yang diteliti terlebih dahulu. Ini merupakan sesuatu yang mutlak dalam penelitian ilmiah, terkecuali terhadap model penelitian yang sifatnya pesanan untuk menjalankan kebijakan publik ataupun memengaruhi konsumen. Dalam lingkup akademis, penelitian ilmiah pesanan sering dikatakan sebagai penelitian pelat merah ataupun penelitian berbasis gizi.

Menarik apa yang dieksplorasi oleh Andi Mallarangeng dari hasil jajak pendapat mengomparasikan popularitas Presiden SBY dengan dua presiden sebelumnya dalam menangani masalah: (1) perekonomian, (2) politik dan keamanan, (3) kesejahteraan sosial, serta (4) hukum. Penilaian responden dalam masa pemerintahan Presiden SBY selama sembilan bulan dibandingkan dengan dua presiden terdahulu adalah Presiden SBY memperoleh 77,5%, 78,6%, 81,9%, dan 82,3%, Presiden Megawati Soekarnoputri dengan nilai 58,0%, 63,1%, 60,2%, dan 57,7%, sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid mendapatkan angka 52,0%, 54,2%, 52,6%, dan 54%. Angka-angka itu menunjukkan Presiden

Bab 9

KEBEBASAN INFORMASI DAN POLITIK LOKAL

1. Marginalisasi Politik Pedesaan

(Media Indonesia, 2 Maret 2006)

Tidak banyak reaksi dan bungkam kepanjangan adalah sikap berbagai kalangan dalam menyikapi demonstrasi para kepala desa yang menuntut agar larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik direvisi.

Tiga pekan telah berlalu ketika Persatuan Kepala Desa dan Perangkatan Desa Nusantara (Parade Nusantara) beramai-ramai mendatangi Departemen Dalam Negeri. Sepertinya tidak akan muncul gaung yang kuat untuk mendiskusikan secara terbuka dan demonstrasi terhadap peran kepala desa dalam kehidupan politik di wilayahnya.

Kecendrungan elite pemerintahan dan politisi mengabaikan politik pedesaan, menimbulkan sejumlah pertanyaan, apakah saat ini komunitas pedesaan dianggap tidak memiliki posisi strategis sebagai alat untuk melakukan *bargaining* politik.

Atau mungkinkah sikap yang tiada peduli tersebut sebagai strategi untuk mengecilkan persoalan, padahal dibalik semua itu, sesungguhnya adalah kesadaran yang tinggi bahwa desa adalah sumber potensial untuk pemilihan umum yang akan datang.

Hakikatnya, melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik tentu saja secara faktual tidak sejalan dengan kehidupan politik di pedesaan yang dinamis sejak bergulirnya reformasi di Indonesia.

BIODATA PENULIS

Dr.Eko Harry Susanto, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan, Sekolah Dasar Negeri, SMP Negeri dan SMA Negeri di Pekalongan. Tahun 1976 kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menulis skripsi "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pembangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan". Mengambil lokasi penelitian di kawasan Pantai Utara Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan berhasil lulus sarjana tahun 1981. Mengawali mengajar pada berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta sejak tahun 1982.

Tahun 1993 kuliah di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, menyusun tesis tentang Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi : Kendala dan Faktor - Faktor Pendukung Dalam Hubungan Antar Etnik. Pada prinsipnya tesis tersebut mengupas pola komunikasi dalam suatu kawasan yang plural dan heterogin dari segi etnisitas, di salah satu wilayah Pantai Utara Jawa Barat. Tahun 1996 lulus Magister Sains (M.Si) Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

Karena ketetarikannya meneliti kompleksitas model komunikasi di masyarakat, tahun 1998 melanjutkan kuliah di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, dan lulus bulan Januari 2004. Menulis disertasi tentang Kredibilitas Opinion Leader Pedesaan (Studi tentang Perubahan Peran Pemuka Pendapat di Desa - Desa Lokasi Industri). Dengan lokasi penelitian di salah satu Kabupaten di Jawa Barat, disertasi kualitatif yang ditulis itu, hakikatnya menelaah tentang, dinamika kawasan industri di wilayah penyangga kota, yang berjalan linier dengan hiruk pikuk reformasi politik di Indonesia. Tuntutan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 1998, memiliki dampak yang sangat berarti terhadap peran opinion leader yang tidak lagi dalam pengendalian hegemoni kekuasaan negara. Kuliah di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran diselesaikan pada bulan Januari Tahun 2004.

Saat ini Dr. Eko Harry Susanto, mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Selain itu, menjadi dosen pada Program S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi lain. Menulis buku Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah (2009), memberi pengantar Buku Sketsa Politik Pilkada Kalsel (2009), dan menjadi salah satu penulis buku Kapita Selekta Ekonomi Indonesia - Suharsono Sagir (2009).

Aktif menulis di Jurnal Ilmiah, dan menuangkan pendapatnya lewat opini di Harian Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Seputar Indonesia, Suara Karya, Jurnal Nasional dan Pikiran Rakyat Bandung. Kegiatan lainnya adalah, memberikan ceramah ataupun sebagai fasilitator dalam seminar, diskusi publik dan workshop, yang berkaitan dengan Komunikasi Politik, Strategi Pencitraan, dan masalah lain yang terkait dengan transparansi komunikasi maupun otonomi daerah.

Jakarta, September 2009



Dalam bingkai demokratisasi berbangsa dan bernegara, esensi, harus ditempatkan secara proporsional ketika akan menelaah dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik. Komunikasi yang substantif sejatinya harus berjalan linier dengan peradaban manusia, yang diwarnai oleh beragam masalah.

Persoalannya, komunikasi seringkali dieksploitasi hanya sebatas untuk retorika yang tidak menghasilkan makna bersama. Pada konteks ini, ada persoalan serius menyangkut konsistensi antara informasi yang dieksplorasi dengan kondisi faktual. Karena itu, buku ini berupaya memaparkan pendekatan teoritis yang memberikan gambaran seputar :

- Komunikasi Manusia yang mencakup Esensi, Konteks, Teknologi Komunikasi, Efektivitas Komunikasi dan Penelitian Komunikasi
- Batasan Komunikasi Politik, yang terkait batasan Pembangunan, Media Massa dan Kekuasaan
- Komunikasi Politik dan Globalisasi, yang fokus kepada Konflik, Opini, Ketergantungan Informasi
- Teknologi Komunikasi, dengan titik berat pada Dampak Perubahan Sosial, Demokrasi dan HAM

Secara substansial, tidak semua esensi dan model komunikasi bisa dipakai untuk membedah penyelesaian masalah. Kendati demikian, komunikasi yang efektif tetap diperlukan demi kesejahteraan umat manusia.
